

1413
630.86
SEM
P13

DIP PERPUSTAKAAN IPB
TAHUN : 2003



ISBN : 979-8637-09-7

**PROSIDING
SEMINAR**

✓ Stock opname
2009

**“Prospek dan Tantangan Pengembangan
Agribisnis Pulp dan Kertas pada Era Ekolabeling
dan Otonomi Daerah”**

Editor:

Dr. Ir. Tungkot Sipayung, MS

Dr. Ir. Rachmat Pambudy, MS

Ir. Burhanuddin, MMA

Ir. Frans Dabukke

Ir. Dwi Astuti Bertha Susila



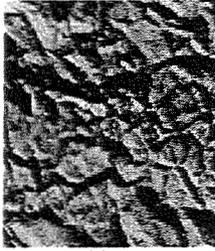
@ tahun 2000

Diterbitkan oleh Pusat Studi Pembangunan Institut Pertanian Bogor

Layout Setting oleh Burhanuddin

Disain Sampul oleh Frans Dabukke dan Burhanuddin

Dicetak oleh Pustaka Wirausaha Muda



DAFTAR ISI

Pengantar Editor, *halaman iii*

Kata Sambutan
Ketua Lembaga Penelitian
Institut Pertanian Bogor, *halaman vi*

Keynote Speech
"Otonomi Daerah dan
Implikasinya terhadap Pengembangan
Agribisnis Pulp dan Kertas di Indonesia", *halaman viii*
Prof. Dr. Ryas Rasyid, Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia

SESI PERTAMA

Prospek dan Tantangan
Pengembangan Industri Pulp dan Kertas
Indonesia Dalam Era Ekolabeling dan Otonomi Daerah, *halaman 1*
Dr. Ir. Gatot Ibnu Santosa, Dirjen Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Departemen
Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia

Prospek dan Tantangan
Pengembangan Industri Pulp dan Kertas
Indonesia Dalam Era Ekolabeling dan Otonomi Daerah, *halaman 29*
Prof. DR. F.G. Suratmo, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB

Membangun Daya Saing Agribisnis Pulp dan
Kertas Dalam Era Ekolabeling dan Otonomi Daerah, *halaman 35*
Prof. Dr. Bungaran Saragih, M.Ec., Kepala Pusat Studi Pembangunan IPB
Dr. Ir. Tungkot Sipayung, Peneliti Senior Pusat Studi Pembangunan IPB

Membangun Daya Saing Industri
Pulp dan Kertas: Masalah Pasokan Bahan Baku Kayu, *halaman 43*
Dr. Ir. Hariadi K., Deputi Pengendalian Kerusakan Lingkungan, BAPPEDAL

Diskusi Sesi Pertama, *halaman 55*

SESI KEDUA

Kemampuan Teknologi Pulp dan Kertas
Mutakhir dalam Mewujudkan Suatu Green Industry, *halaman 72*
Ir. Sutrisno T. Sudirjo, Peneliti Senior Balai Besar Selulosa

Kemampuan Teknologi Pulp dan Kertas
Mutakhir dalam Mewujudkan Suatu Green Industry, *halaman 100*
Nyoman Jaya Wistara, PhD., Jurusan Teknologi Hutan Fakultas Kehutanan IPB

Budidaya Tanaman Kayu Pulp, *halaman 112*
Prof. Dr. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, MF., Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB

Dukungan Pembibitan dan Budidaya Tanaman
Kayu Hutan untuk Pelestarian Industri Pulp dan Kertas, *halaman 120*
Prof. Dr. Ir. Oemi Hani'in Soeseno, Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM
Ir. Sukirno D. Prianto, Jurusan Teknologi Hasil Hutan Fakultas Kehutanan UGM

Dukungan Pembibitan dan Budidaya Tanaman
Kayu Hutan untuk Pelestarian Industri Pulp dan Kertas, *halaman 136*
Ir. Makmur Damanik, Manajer Penelitian dan Pengembangan PT Indorayon Utama

Diskusi Sesi Kedua, *halaman 149*

Kesimpulan dan Rekomendasi, *halaman 156*

Daftar Hadir Seminar, *halaman 159*

Biodata Singkat Pembicara dan Pemanding, *halaman 165*



PENGANTAR EDITOR

Ketegangan pemanfaatan sumberdaya alam seperti hutan telah lama terjadi dalam sejarah peradaban manusia modern. Pengagum pembangunan (*developmentalis'm*) melihat hutan sebagai sumberdaya ekonomi yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi. Sementara pengagum lingkungan (*environmenlis'm*) melihat hutan sebagai bagian "organ tubuh alam" yang bila dieksploitasi akan merusak keseimbangan alam. Kemudian pengagum sosial (*socialis'm*) melihat pemanfaatan hutan maupun pelestarian hutan mengabaikan hak-hak rakyat lokal.

Nampaknya, ketegangan antara ketiga kubu tersebut juga terjadi dalam perkembangan agribisnis pulp dan kertas, termasuk di Indonesia. Pengagum pembangunan (termasuk pengusaha), melihat agribisnis pulp dan kertas sebagai salah satu "mesin ekonomi" yang menghasilkan kue ekonomi seperti kesempatan kerja dan berusaha, pendapatan, pajak, devisa negara dan lain-lain. Sementara pengagum lingkungan yang dimotori aktivitas lingkungan melihat kehadiran agribisnis pulp dan kertas sebagai perusak hutan dan lingkungan. Sedangkan pengagum sosial melihat kehadiran agribisnis pulp dan kertas sebagai kompetitor kesempatan ekonomi dan mengeksploitasi hak-hak rakyat lokal. Begitu kuatnya ketiga kubu tersebut, bukan hanya pada level pemikiran/paradigma, tetapi juga pada level aksi, sehingga konflik terbuka antar kubu acapkali terjadi.

Belakangan muncul aliran tengah-tengah yang dikenal dengan pengagum pembangunan berkelanjutan (*sustainable developmentalis'm*). Aliran tengah-tengah ini yang pendukungnya berasal dari ketiga kubu tersebut, menginternalisasi kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial ke dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam (hutan) termasuk agribisnis pulp dan kertas. Aspek ekonomi, lingkungan, sosial dijadikan *value* perusahaan agribisnis pulp dan kertas. Upaya memutus ketergantungan agribisnis pulp dan kertas pada hutan alam melalui pengembangan *timber plantation*,

mengupayakan secara terus menerus penyempurnaan teknologi terbersih (*strive cleaner technologies*) pada seluruh proses, dan mengintegrasikan agribisnis pulp dan kertas dengan ekonomi rakyat lokal melalui *community development*, diharapkan dapat membuat agribisnis pulp dan kertas menjadi warga masyarakat yang baik (*to be good corporate citizen*) yakni *good* dalam *socio-performance, environmental performance* maupun dalam *economic-performance*.

Bahwa kenyataan saat ini agribisnis pulp dan kertas masih jauh dari *to be good corporate citizen* tersebut, itulah fakta yang dapat diterima. Memang sebagai industri yang masih relatif baru di Indonesia (dibandingkan di negara lain), agribisnis pulp dan kertas masih memerlukan waktu untuk belajar. Meskipun demikian komitmen kearah tersebut sudah ada betapapun kecilnya. Pengembangan *timber plantation* (seperti HTI), adanya R & D pada *breeding* tanaman kayu hutan termasuk kebun benih (*nursery*), pelaksanaan *community development* terlepas dari soal efektivitasnya, merupakan salah satu bentuk komitmen kearah tersebut. Bahkan kesediaan pelaku agribisnis pulp dan kertas untuk di kritik, dan mendiskusikan persoalannya juga menunjukkan komitmen untuk itu. Persoalannya adalah bagaimana mempercepat proses yang ada, sehingga secepat mungkin mewujudkan *to be good corporate citizen* tersebut. Mempercepat proses tersebut bukan sekadar tuntutan ekalabeling dan otonomi daerah semata, melainkan bagian dari upaya membangun keunggulan bersaing agribisnis pulp dan kertas Indonesia di pasar internasional.

Barangkali hal-hal tersebutlah yang dapat ditarik sebagai benang merah dari makalah dan diskusi selama seminar yang disajikan dalam Buku Prosiding: PROSPEK DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PULP DAN KERTAS DALAM ERA EKOLABELING DAN OTONOMI DAERAH, ini.

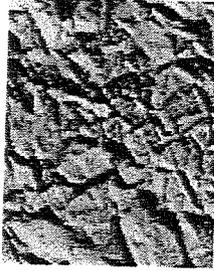
Secara garis besar, informasi yang demikian dapat ditelusuri pada dua sesi utama. Sesi Pertama: membahas; Prospek dan Tantangan Industri Pulp dan Kertas Indonesia Dalam Era Ekolabeling dan Otonomi Daerah (Dr.Ir. Gatot Ibusantosa dengan pembanding Prof.Dr. F.G. Suratmo); Membangun Daya Saing Agribisnis Pulp dan Kertas Dalam Era Ekolabeling dan Otonomi Daerah (Prof.Dr.Ir. Bungaran Saragih, MEd dengan pembanding Dr.Ir. Hariadi Kartodihardjo). Sesi Kedua: Kemampuan Teknologi Pulp dan Kertas Dalam mewujudkan Green Industry (Ir. Sutrisno T. Sudirdjo dengan pembanding Dr.Ir. Nyoman Wistara); Dukungan Pembibitan dan Budidaya Tanaman Kayu Hutan untuk Pelestarian Industri Pulp dan Kertas (Prof.Dr.Ir. Rudy C. Tarumingkeng dan Prof.Dr.Ir. Oemi Hani'in Soeseno, dengan pembahas Ir. Makmur Damanik). Selain itu, setiap sesi dilengkapi dengan notulen diskusi antara panelis dengan peserta.

Prosiding seminar ini layak dan bermanfaat untuk dibaca oleh pengusaha agribisnis pulp dan kertas, rimbawan, pengambil kebijakan (pemerintah baik pusat maupun daerah), mahasiswa, masyarakat pengguna kertas, aktivis

lingkungan dan lain-lain. Paling sedikit prosiding ini dapat memberi informasi awal untuk menelusuri bagaimana agribisnis pulp dan kertas Indonesia dan kearah mana pemikiran yang sedang berkembang akan melangkah ke depan. Apalagi dalam era otonomi daerah yang sedang digulirkan di Indonesia, buku prosiding ini sangat bermanfaat sebagai salah satu referensi dalam melihat keberadaan agribisnis pulp dan kertas yang hampir seluruhnya ada di daerah.

Bogor, Juli 2000

TIM EDITOR



**KATA SAMBUTAN
KETUA LEMBAGA PENELITIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

*Yang kami hormati,
Bapak Menteri Negara Otonomi Daerah
Para Pembicara, Pembanding dan Moderator
serta hadirin yang berbahagia*

Untuk kesekian kalinya, Pusat Studi Pembangunan Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor, menyelenggarakan seminar yang kali ini mengambil tema: **Prospek dan Tantangan Pengembangan Agribisnis Pulp dan Kertas Dalam Era Ekolabeling dan Otonomi Daerah**. Suatu tema aktual dan merupakan salah satu pergumulan pembangunan saat ini.

Melihat data-data pasar pulp dan kertas dunia, tampaknya ada kecenderungan bahwa produsen pulp dan kertas dunia ke depan akan bergeser dari daerah sub-tropis ke daerah tropis. Dalam kecenderungan tersebut, Indonesia berkesempatan untuk menjadi salah satu produsen pulp dan kertas yang penting. Karena itu, agribisnis pulp dan kertas dapat menjadi salah satu industri unggulan ke depan.

Namun, mengembangkan agribisnis pulp dan kertas di Indonesia ke depan, akan dihadapkan sejumlah tantangan. Agribisnis pulp dan kertas yang sangat dekat dengan sumberdaya alam dan lingkungan, menuntut pengembangan agribisnis pulp dan kertas yang mampu mewujudkan industri ramah lingkungan (*green industry*). Selain itu, pengembangan agribisnis pulp dan kertas juga perlu terintegrasi dengan ekonomi rakyat lokal sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang sedang dikembangkan. Dengan perkataan lain, kita memerlukan konsep pengembangan agribisnis pulp dan kertas yang

mampu mengakomodasikan kepentingan perusahaan, lingkungan, rakyat lokal dan pemerintah secara seimbang.

Bahwa konsep yang demikian belum ada, itulah tugas kita bersama untuk merumuskannya. Demikian juga, jika saat ini ada agribisnis pulp dan kertas yang menghadapi masalah konflik dengan masyarakat lokal atau persoalan lingkungan, mari kita cari solusinya. Dalam pembangunan negara ini kita memerlukan suatu konsep pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable development*) yang mengakomodasikan pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*) dan kelestarian lingkungan (*environmental friendly*). Konsep yang demikianlah kita harapkan lahir dari seminar ini.

Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak khususnya kepada Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia, yang telah membantu terselenggaranya seminar ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Negara Otonomi Daerah yang telah bersedia memberikan *keynote speech* pada seminar ini.

Atas perkenan Bapak/Ibu sekalian, dengan ini kami menyatakan seminar: **PROSPEK DAN TANTANGAN AGRIBISNIS PULP DAN KERTAS DALAM ERA EKOLABELING DAN OTONOMI DAERAH** secara resmi dibuka.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan hikmah dan kekuatan kepada kita semua.

Bogor, 4 Juli 2000
a.n. Ketua Lembaga Penelitian IPB

DR. IR. S.M.H. TAMPUBOLON, MSc.



KEYNOTE SPEECH

Prof. Dr. Ryaas Rasyid
Menteri Negara Otonomi Daerah

“OTONOMI DAERAH SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PULP DAN KERTAS DI INDONESIA”

*Yang Terhormat,
Peserta Seminar dan Saudara hadirin yang berbahagia,*

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang atas perkenan-Nya kita dapat berkumpul pada Seminar Pengembangan Industri Pulp dan Kertas dalam keadaan sehat wal'afiat di pagi yang cerah ini.

Seminar ini mempunyai makna yang cukup penting mengingat kita dalam suasana memasuki era kebangkitan bernegara yang kedua yaitu penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom.

Indonesia adalah Negara yang sedang menuju sistem desentralistik dan oleh karenanya banyak sekali manfaat yang didapatkan dengan sistem desentralisasi. Penyerahan kewenangan dan sumberdaya serta akuntabilitas pejabat daerah diperkirakan akan menghasilkan suatu sistem pemerintahan yang lebih responsife dan pelayanan umum yang lebih berkualitas, cepat, dekat

dengan masyarakat dan efisien atau yang lebih dikenal dengan "one top service". Walaupun dirasakan terlambat, hadirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dirasakan sangat tepat dalam iklim demokrasi ini. Sentralisasi kekuasaan akan berpindah dari Pusat ke Daerah Kabupaten/kota dan sebagian ke Pemerintah Propinsi. Oleh karenanya daerah dapat mengatur dirinya sendiri tanpa intervensi oleh pusat dan dapat melayani apa yang terbaik bagi masyarakatnya.

Filosofi otonomi tidak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat serta penciptaan lapangan kerja di daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian daerah. Salah satu faktor yang terpenting adalah birokrasi yang panjang akan dipangkas dan otomatis menjadi efektif dan efisien karena semua kewenangan yang dikeluarkan tidak perlu lagi ke pusat tetapi langsung pada pusat pelayanan daerah yang bisa saja sampai ke tingkat kecamatan. Jalur birokrasi yang panjang dan berbelit-belit akan menjadi sederhana dan cepat bagi aplikasi perijinan usaha di daerah.

Esensi lain adalah peranan masyarakat daerah akan lebih nyata dan lebih diberdayakan, karena masyarakat dilibatkan langsung bersama-sama dengan wakil rakyat dalam mengambil keputusan perencanaan pembangunan di daerah. Masyarakat dilibatkan secara utuh dan tidak hanya sebagai penonton, dengan demikian masyarakat akan merasakan manfaat pembangunan dan merasa *homely* di daerahnya sendiri. Keberadaan mereka diakui dan kemananannya dilindungi. Kesewenang-wenangan pasti akan hilang dalam iklim yang demokratis dan serba terbuka ini.

Sebagai konsekwensi berlakunya Undang-undang Nomor 22 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, dan untuk merumuskan kewenangan yang masih perlu di tingkat Pemerintah dan Pemerintah Propinsi maka telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom pada tanggal 6 Mei 2000, tepat satu tahun sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Kewenangan Kabupaten/Kota tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah ini karena pada prinsipnya kewenangan berada di Kabupaten/Kota kecuali yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Bila kewenangan Kabupaten/Kota diatur dalam suatu daftar, maka akan merugikan Kabupaten/Kota bila masing-masing kewenangan yang luput diatur/disusun dalam daftar kewenangan dan oleh karenanya Kabupaten/Kota bebas mengatur semua yang tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Dengan memperhatikan isi Peraturan Pemerintah ini maka ada beberapa pasal yang perlu diketahui untuk menjamin kepastian hukum di Indonesia yang sangat berkaitan dengan peningkatan iklim investasi dan sebagai suatu negara yang berdaulat antara lain:

Petama:

Perjanjian dan komitmen internasional yang telah berlaku dan akan dibuat oleh Pemerintah juga berlaku bagi Daerah Otonom. Perjanjian dan kerjasama oleh daerah dengan lembaga/badan di luar negeri berdasarkan kewenangan daerah otonom tidak boleh bertentangan dengan ketentuan kesepakatan serupa yang dibuat oleh Pemerintah (pasal 5).

Kedua:

Perizinan dan perjanjian kerjasama Pemerintah dengan pihak ketiga berdasarkan kewenangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berlakunya perizinan dan perjanjian kerjasama (pasal 8).

Kedua item di atas merupakan komitmen luar negeri Pemerintah Indonesia bahwa Pemerintah menghormati seluruh produk hukum yang berlaku dan sebagai suatu Negara Kesatuan yang utuh. Dari daftar kewenangan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah ini, maka tampak bahwa kewenangan pusat mempunyai porsi yang besar dalam pembuatan kebijakan-kebijakan tentang pedoman, standar, kriteria dan norma bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan agar tercapai suatu sinergi yang optimal antara Pemerintah Pusat dan daerah otonom. Beberapa hal masih perlu pengaturan yang sifatnya sangat strategis seperti minyak bumi dan bahan radioaktif agar identitas dan integritas bangsa dalam wadah Negara Kesatuan tetap terjaga.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah tersebut harus dapat meningkatkan taraf hidup dan keamanan masyarakat. Artinya keleluasaan yang diletakkan pada daerah otonom harus mampu mengelola potensi daerah termasuk pengembangan industri secara optimal dalam iklim investasi yang kondusif dan pengelolaan yang berlandaskan prinsip-prinsip sosial ekonomi daerah.

Prinsip-prinsip di atas juga berlaku bagi pengembangan Agribisnis Pulp dan Kertas. Ecolabeling sangat terkait dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diatur dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000. Oleh karena itu pengembangan agribisnis dimanapun industri tersebut berada harus taat pada perjanjian internasional yang telah disetujui oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lingkungan hidup akan menjamin kelangsungan hidup manusia. Dari sisi bisnis, *ecolabeling* merupakan suatu penambahan biaya produksi, tetapi yang terpenting adalah bahwa produk-produk industri Republik Indonesia diakui oleh dunia perdagangan dan memberikan kepercayaan produk bagi dunia luar termasuk produk agribisnis pulp dan kertas.

Dalam era otonomi daerah, daerah mempunyai kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri termasuk investasi yang akan diterapkan agar agribisnis pulp dan kertas dapat berkembang baik untuk keperluan dalam negeri dan untuk keperluan ekspor. Produk-produk yang

telah mengikuti prinsip *ecolabeling* harus mampu berkompetisi dengan produk sejenis, baik harga, kualitas maupun jaminan pelayanan sesuai dengan prinsip-prinsip daerah akan memberikan peluang dan prospek yang baik dalam agribisnis pulp ini.

Agar investasi dapat berjalan dengan baik dan kondusif, maka Pemerintah Daerah akan berupaya untuk memberikan insentif dan kemudahan-kemudahan baik di bidang perizinan sampai dengan masalah-masalah pertanahan agar industri tetap tumbuh sehat dan lapangan kerja tetap terjamin. Inilah wujud otonomi daerah yang dicita-citakan yaitu menuju kepada industri yang mampu berkompetisi di era globalisasi dengan tetap berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat dalam bentuk jaminan lapangan kerja dan pendapatan daerah yang diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu prinsip transparansi antara pengusaha, pemerintah dan masyarakat harus tetap tumbuh dengan sehat. Masyarakat harus mengetahui manfaat dari suatu kegiatan di daerahnya masing-masing. Otonomi daerah justru akan memberikan kegairahan baru dalam dunia industri pulp dan kertas karena dapat dilakukan suatu perencanaan dan implementasi kegiatan dalam suatu atap.

Pemahaman akan peraturan perundang-undangan khususnya tentang pungutan-pungutan/retribusi bagi jalur lalu lintas barang dan jasa perlu dipikirkan konsekwensi negatifnya.

Sebagai resume dan rekomendasi bagi penciptaan iklim investasi yang kondusif di daerah termasuk pengembangan agribisnis pulp dan kertas adalah sebagai berikut:

1. Otonomi daerah akan memberikan kegairahan baru dalam menumbuhkan investasi yang kuat, sehat dan mampu berkompetisi. Jalur birokrasi yang panjang dan berbelit-belit akan menjadi lebih sederhana dan cepat bagi aplikasi perizinan di daerah.
2. Perencanaan tata ruang investasi harus berorientasi kepada kelestarian lingkungan dan memperhitungkan kalkulasi-kalkulasi secara cermat yang didasarkan kepada semua aspek pembangunan.
3. Peraturan daerah yang dikeluarkan perlu memperhitungkan semua aspek kehidupan dalam rangka untuk kesejahteraan rakyat. Tidak saja untuk mendapatkan pendapatan atau semangat memungut dari hasil jasa dan industri tetapi perlu menghormati adat istiadat yang berlaku di masyarakat, karakteristik dan kekhasan masing-masing daerah. Disamping itu Peraturan daerah perlu memperhatikan kemudahan-kemudahan dan insentif yang akan diberikan agar iklim investasi menjadi tumbuh sehat dan tetap bergairah.
4. Jaringan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat termasuk di dalamnya adalah para pelaku pasar harus tercipta dengan baik agar semua

dipecahkan bersama pemerintah dan masyarakat sebagai bagian dari pelaku pembangunan di daerah.

Implikasi dari kebijakan ini akan memberikan kegairahan baru dalam pengelolaan daerah. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terus terjaga dengan semangat persatuan dan kesatuan serta pemahaman yang komprehensif tentang pengelolaan daerah otonom. Oleh karena itu pengelolaan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam era otonomi ini perlu dicermati dan dipahami secara baik dan selanjutnya merumuskan strategi pengelolaan yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan menghilangkan sifat ego kedaerahan yang cenderung dapat menurunkan derajat iklim investasi suatu kawasan dan tidak menguntungkan dari sisi pembangunan yang "*sustainable*".

Demikian sekilas catatan tentang prospek pengembangan agribisnis pulp dan kertas di dalam era otonomi daerah, kewenangan yang luas telah diletakkan, memanfaatkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

*Selamat berseminar
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Jakarta, 4 Juli 2000

MENTERI NEGARA OTONOMI DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

Sumber;

1. Sumber PP No. 25/2000 Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom
2. Sabutan Menteri Negara Otonomi Daerah pada Rapat Kerja DEPERINDAG, Jakarta 21 Maret 2000
3. Key Note Speech Menteri Negara Otonomi Daerah pada Seminar Nasional Kontribusi Dunia Usaha Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi Daerah, Lampung 13 Juni 2000.

SESI PERTAMA

SESI KEDUA



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

1. Secara internasional produsen pulp dan kertas di dominasi oleh negara-negara sub-tropis khususnya Norscan. Namun, terdapat kecenderungan bahwa produsen pulp dan kertas akan bergeser dari sub-tropis ke daerah tropis. Dalam kecenderungan tersebut, peranan Indonesia bertumbuh tercepat diantara negara-negara tropis.
2. Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam agribisnis pulp dan kertas, karena memiliki iklim tropis yang mendukung produksi serat alam, lahan yang relatif luas, keragaman tanaman serat alam (kayu, non kayu) yang cukup besar. Selain memiliki keunggulan komparatif agribisnis pulp dan kertas Indonesia juga memiliki keunggulan kompetitif di pasar internasional. Hal ini ditunjukkan oleh indeks RCA yang meningkat dari tahun ketahun. Oleh karena itu, agribisnis pulp dan kertas perlu dijadikan sebagai salah satu industri unggulan Indonesia ke depan.
3. Dalam pengembangan agribisnis pulp dan kertas Indonesia kedepan, dihadapkan pada paling sedikit dua tantangan besar yaitu tuntutan ekolabeling dan otonomi daerah. Ekalabeling mengharuskan agribisnis pulp dan kertas secara sistem haruslah ramah lingkungan (*environmental friendly*). Sedangkan dalam era ekonomi daerah menuntut agribisnis pulp dan kertas perlu menjadi lokomotif pengembangan ekonomi rakyat dan ekonomi daerah.
4. Untuk mewujudkan suatu agribisnis pulp dan kertas yang ramah lingkungan diperlukan langkah konkrit berikut : pertama, mempercepat pemutus-ketergantungan agribisnis pulp dan kertas pada hutan alam

(*virgin forest*) dengan mempercepat pengembangan perkebunan kayu (*timber plantation*) seperti hutan tanaman industri (HTI). Untuk itu penelitian dan pengembangan dibidang pemuliaan tanaman kayu (*breeding*), pengembangan kebun pembibitan (*nursery*) dan teknologi budaya (*silvikultur*) perlu dipacu secepatnya. Kedua, upaya memperbaiki teknologi pengolahan secara terus menerus menuju teknologi terbersih (*strive cleaner technologies*). Untuk itu mencari dan mengaplikasikan teknologi terbersih termutakhir melalui penelitian dan pengembangan teknologi perlu menjadi komitmen bersama. Kedua upaya tersebut akan menuju agribisnis pulp dan kertas Indonesia menjadi *green industry*. Sedangkan secara ekonomi, upaya-upaya tersebut merupakan cara mentransformasi keunggulan komparatif menjadi keunggulan bersaing yakni mengembangkan agribisnis pulp dan kertas dari yang digerakkan kelimpahan sumberdaya alam (*factor-driven*) kepada yang digerakkan modal (*capital-driven*) dan kemudian digerakkan oleh inovasi (*innovation-driven*).

5. Untuk menjadikan agribisnis pulp dan kertas sebagai lokomotif ekonomi rakyat lokal, perlu dikembangkan program pengembangan masyarakat (*community development, CD*). Program CD yang dimaksud bukan bentuk bantuan sosial yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan agribisnis pulp dan kertas, melainkan bentuk-bentuk "merakyatkan/melokalkan" sebagian kegiatan agribisnis pulp dan kertas kepada masyarakat lokal, seperti penyediaan dan pengangkutan kayu, pengembangan *timber plantation* skala kecil - menengah dan lain-lain. Untuk itu pengembangan pasar kayu tegakan (*stumpage market*) di daerah perlu dilakukan untuk memfasilitasi transaksi kayu tegakan (*spot or future market*) tanpa harus melakukan transaksi lahan.
6. Upaya No. 4 dan No. 5 diatas, akan mewujudkan agribisnis pulp dan kertas menjadi warga masyarakat yang baik (*to be good corporate citizen*) yakni *socio performance, environmental performance dan economic performance* yang baik.
7. Kebijakan pemerintah baik pada level nasional maupun level daerah, perlu direkonstruksi secara optimal untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi arah pengembangan agribisnis pulp dan kertas menjadi *to be good corporate citizen*. Objektif fiskal (pajak) hendaknya tidak hanya dalam upaya memaksimalkan penerimaan (PAD), namun lebih ditujukan sebagai sistem *reward* dan *penalty* sedemikian rupa, sehingga ada insentif atau disinsentif bagi pelaku agribisnis pulp dan kertas untuk selalu memperbaiki kinerjanya. Selain itu, kemungkinan penerapan *environmental accounting* dalam perhitungan PDRB dan PDB perlu dikembangkan sebagai bagian dari komitmen *sustainable development*.

2. Rekomendasi

Mengingat agribisnis pulp dan kertas didaerah-daerah banyak yang menghadapi konflik (potensial, aktual), direkomendasikan agar semua pihak (pemerintah, pengusaha, masyarakat, LSM) dapat mencari solusi yang bijaksana yakni mewujudkan suatu *win-win solution* yang mengakomodasikan kepentingan masyarakat, pengusaha, kelestarian lingkungan dan pemerintah secara optimal. Semua pihak hendaknya memberi kontribusi bagi terwujudnya suatu agribisnis pulp dan kertas yang *to be good corporate citizen* secara nyata dan bukan sekadar retorika.



**DAFTAR HADIR
SEMINAR**

**“Prospek dan Tantangan Pengembangan
Agribisnis Pulp dan Kertas pada Era Ekolabeling
dan Otonomi Daerah”**

Golden Ballroom Hotel Hilton Jakarta, 4 Juli 2000

No.	Nama	Instansi
1.	Azmi Dhalimi, Dr. Ir.	Balittro, Bogor
2.	Edison T.T. Hasibuan	Masyarakat Pencinta Toba Lestari
3.	Mufti Madjid	Bapedalda ACEH
4.	Haris Witjaksono	Sucofindo
5.	Djamzu Papan	Putera Group
6.	Bambang Prasetyo	Menteri Negara Otonomi Daerah
7.	H. Surmawi Abas, Drs. Ir.	Balai Besar Selulosa
8.	Oemi H. Soeseno, Prof. Dr.	Universitas Gajah Mada
9.	Sukirno D. Prianto, Ir. MS	Universitas Gajah Mada
10.	WH Limbong, Dr.	Institut Pertanian Bogor
11.	R. Soetanto, Drs.	PT Soear Sakti Paper Corp.
12.	Jimmy Juneanto	PPGI
13.	S. Budidarsono	ICRAF

*Prosiding Seminar
Pulp dan Kertas*

14.	Nony	PT Jaya Kertas
15.	Leo Batubara	MPPI
16.	Rudy S. Nichliny	PT Surveyor Indonesia
17.	Harianto, Dr.	Institut Pertanian Bogor
18.	Sumardi Sjam	BPEN
19.	Suresh Kilam	Sinar Mas (IKPP)
20.	Gerryt Hamboer	PT Riau Andalan Pulp & Paper
21.	Agung Atmoko	PT Kerta Kraft Aceh
22.	Rizal	RAPP
23.	Sudiono	Dinas Kehutanan Propinsi Riau
24.	Gunarwan Suratmo	Fakultas Kehutanan IPB
25.	Iswahyuni Fithana H.	Teknik Kimia, ITB
26.	Hari Hartono	PT Balai Pustaka
27.	Tuti	PICCI
28.	Retno S., Prof.	PSL UI
29.	Ahmad Rosadi	PT Kertas Bekasi Teguh
30.	Ahmad S.	Jaya Kertas
31.	Esmiel	PT IIU
32.	Ali Fahmi	Komppak Borneo
33.	Hafidh	BUPM
34.	Effendi	Perum PERURI Jakarta
35.	Mardiyono	Perum PERURI Jakarta
36.	Bambang P. Suroto	Dinas Kehutanan Pelelawan, Riau
37.	Azhar Amin	BAPPEDA Aceh
38.	A. Rizal	PT Noree Indonesia
39.	Ilhamy Elias, Dr.	Kompartemen LH - KADIN
40.	M. Mansur	APKI
41.	Togu Manurung, Dr.	Fakultas Kehutanan IPB
42.	Didi Harsa	PT Indah Kiat Pulp & Paper
43.	Sutamat	PT Kertas Kraft Aceh

*Prosiding Seminar
Pulp dan Kertas*

44.	Andi Andriadi, Ir. MM.	Dept. Kehutanan dan Perkebunan
45.	Karyono Supomo	PMPBUMN
46.	Agus	PT Riau Andalan Pulp & Paper
47.	SMH Tampubolon, Dr. Ir.	Institut Pertanian Bogor
48.	Erick Sitompul	RGM
49.	Kris Suyanto JF	Jati Emas Plus
50.	Njauw Kwet Meen	PT Indah Kiat Pulp & Paper
51.	Tato Muhammad, Ir.	ASKINDO
52.	Dana A. Kartakusuma	Kantor Meneg Lingkungan Hidup
53.	Danu Wijaya, Ir.	Bapedalda Jawa Timur
54.	Deny K.	Dept. Kehutanan dan Perkebunan
55.	Hari	CNS
56.	Mawalid	Jakarta
57.	J. Daniel L	PT Pura Barutawa
58.	Hariadi Kartodiharjo, Dr. Ir.	BAPEDAL
59.	Djumali	Business News
60.	Rajoki	CNS
61.	Makmur Damanik, Ir.	PT IIU Porsea
62.	Rudy P.	PT Riau Andalan Pulp & Paper
63.	P. Daritan	PT Riau Andalan Pulp & Paper
64.	Willy Laluyan	PT. Pradnya Paramita
65.	Agus Tri Murjoko	BAPEDAL
66.	Amelia Agusni	Kantor Meneg. Lingkungan Hidup
67.	Aryan Warga Dalam	Dit. IPK Depperindag
68.	Agus Purwanto	RGMI
69.	Antonius NG	PT Riau Andalan Pulp & Paper
70.	Teddy Suratmadji	PT Kiani Kertas
71.	Rudy C. Tarumingkeng	Institut Pertanian Bogor
72.	Ilianto Budiman, Ir.	Kakanwil Dephutbun Jawa Barat
73.	Vidya S. Nalang	BAPEDAL

*Prosiding Seminar
Pulp dan Kertas*

74.	Kahar Haryopuspito	APKI
75.	Robert Mandagi	AUMI
76.	Fauzi Lubis	PPGI
77.	Rohadi, Drs.	Surabaya Jaya Kertas
78.	Widjang MA	BKPM
79.	Soetrisno T. Sudirjo, Ir.	Balai Besar Selulosa
80.	Lee Won Je	PT Aspex Kumbong
81.	Antonius	PT Riau Andalan Pulp & Paper
82.	Makno Basuki	PT Katama
83.	M. Arifin	Bapedalda Jambi
84.	Amirudin	CNS
85.	Suwarso	PT SBA Wood Industries
86.	Agus M.	Jawa Pos
87.	Paigunadi T. Setyawan	RGMI Group
88.	Nyoman Jaya Wistara, Dr.	Fakultas Kehutanan IPB
89.	Mulawarman, Ir. MS.	ICRAFT
90.	Dede S. Oeron	Kantor Meneg. Otonomi Daerah
91.	S.W. Singarimbun	Kantor Meneg. Otonomi Daerah
92.	Hendris Widjaja	RAPP
93.	Toga Silitonga, Dr.	Departemen Kehutanan
94.	Bambang Prayitno	Perum PERURI
95.	MH Matondang, Dr.	UNKRIS
96.	Siti Nuril Hamimah, Ir.	Dept. Kehutanan dan Perkebunan
97.	Nalwan	PT TZL
98.	Tressna Edward	PT Kertas Kraft Aceh
99.	Imran M. Syam	PT Kertas Kraft Aceh
100.	Maharani K.	Kantor Meneg. Lingkungan Hidup
101.	Edy Sutopo	Direktorat IPK, Depperindag
102.	Levania Santoso	CIFOR, Bogor
103.	Kim Young Cheol	Aspex Paper

*Prosiding Seminar
Pulp dan Kertas*

104.	Bungaran Saragih, Prof. Dr.	PSP IPB
105.	Gatot Ibnusantosa, Dr.	Depperindag
106.	Tony J. Kristianto	Agri Business Club
107.	Ardiansyah D.	BAPPEDA Kalimantan Timur
108.	Doddy S. Sukadri	P2SE Litbang Hutbun
109.	Erwidodo, Dr.	P2SE Litbang Hutbun
110.	Suharsono Kramadibrata	PT Kiani Kertas
111.	Agus Wahyudi	PT Indah Kiat Pulp & Paper
112.	Titus Sarijanto, Ir. MSc.	Iluni Kehutanan IPB
113.	Ratna Indrayani	RGMI Group
114.	Baginda Siagian, Ir.	PSP IPB
115.	Burhanuddin, Ir. MM.	PSP IPB
116.	Tungkot Sipayung, Dr. Ir.	PSP IPB
117.	Dahri Tanjung, Ir. MS.	PSP IPB
118.	Frans Dabukke, Ir.	PSP IPB
119.	Agit Kriswantriyono, Ir.	PSP IPB
120.	N. Kusumawardhani, Ir.	PSP IPB
121.	Dwi A. B. Susila, Ir.	PSP IPB
122.	Nulwita Maliati, Ir.	PSP IPB
123.	Wien Kuntari, Ir.	PSP IPB
124.	Dyah Rukmitasari, Ir.	PSP IPB
125.	Lina Marlina S., Dra.	PSP IPB
126.	Tety Halida	PSP IPB
127.	Rachmat Surawijaya	PSP IPB
128.	Harun Ismail	PSP IPB
129.	Fuad Chairani	PSP IPB
130.	Joko Marjono	PSP IPB
131.	Suyana	PSP IPB
132.	Sudiyana	PSP IPB
133.	M. Nasir	PSP IPB

*Prosiding Seminar
Pulp dan Kertas*

134.	Haryo H.	Harian Media Indonesia
135.	Luba	RCTI
136.	Lang Alamanda	TPI
137.	Helmi	Indosiar
138.	Anonim	The Jakarta Post
139.	Anonim	Moneter Indonesia
140.	Anonim	Suara Karya
141.	Anonim	Harian Waspada
142.	Anonim	Harian Wawasan
143.	Anonim	Harian Suara Merdeka
144.	Anonim	Harian Jawa Pos
145.	Anonim	Majalah Trubus
146.	Anonim	Majalah Komoditas
147.	Anonim	TVRI Jakarta



BIODATA SINGKAT PEMBICARA DAN PEMBANDING

GATOT IBNUSANTOSA. Lahir di Surabaya 2 Mei 1951. Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Surabaya (ITS) tahun 1971. Doktor bidang Teknologi Proses diperoleh dari INPG Perancis tahun 1988. Jabatang penting yang pernah dipercayakan pada beliau antara lain: Kepala Balai Pulp pada Balai Besar Selulosa Bandung (1993 - 1994); Direktur Industri Pulp, Kertas dan Produk Kertas Departemen Perindustrian (1994-1998) dan sejak tahun 1998 sampai sekarang menjabat Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Ditjen IKAH, DEPPERINDAG. Selain itu, beliau juga menjadi dosen pada UNWIM Bandung, Komisaris Utama PT. Kertas Leceas dan Dewan Komisaris pada PT. Pupuk Gresik dan PT. Semen Gresik.

BUNGERAN SARAGIH. Lahir di Pematang Siantar, 17 April 1945. Sarjana S-1 dari Institut Pertanian Bogor (Tahun 1971), Magister Sains bidang Ekonomi (major) dan Statistik (minor) dari North Carolina State University, U.S.A (1977) dan pada ahun 1980 memperoleh Doktor bidang Ekonomi (major) dan Sosiologi (minor). Selain sebagai pengajar bidang ekonomi pada S-1, S-2, S-3 IPB, beliau juga pengajar pada SESPANAS LAN, LEMHANAS, Guru Besar Tamu pada University Gottingen Jerman, Visiting Scholar pada Kyoto University, Japan dan Colorado State University Fort Collin, Colorado, USA. Beliau juga menjadi Anggota Dewan Produktivitas Nasional, POKJAWAN-HANKAMNAS, Forum Komunikasi Statistik Nasional, BPS, Komite Reformasi Perkebunan dan Kehutanan, Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Manajemen Agribisnis Indonesia, Ketua Pimpinan Pusat HKTI, Dewan Pembina Forum Komunikasi Pengusaha Kecil-Menengah Indonesia, anggota Asutralian Agribusiness Club, International Agribusiness Management Assosiasi, USA ; Asia Agricultural Association Barkah. Beliau termasuk salah satu pembicara seminar yang memiliki jam terbang tinggi pada seminar nasional dan internasional.

F. GUNARWAN SURATMO. Lahir di Klaten 29 Oktober 1936. Sarjana S-1 dari Jurusan Kehutanan UI (sekarang IPB) Tahun 1962, Master Of Science dari Duke University (USA) Tahun 1966, Doktor dari IPB Tahun 1975. Selain itu, beliau juga memperoleh pendidikan khusus bidang Environment Impact Analysis pada University of The Philipines (1979) dan Advantage Environmental Impact Assesment dari Univeristy of Delhonsie Canada (1984). Guru Besar Ilmu perlindungan Hutan dan Lingkungan ini, telah menghasilkan ratusan penelitian pada bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Selain pengajar pada program S-1, S-2, S-3 jabatan yang pernah dipercayakan antara lain Ketua Jurusan Program Studi Lingkungan Pasca Sarjana IPB, dan Dekan Fakultas Kehutanan IPB. Serta menjadi pembicara seminar tingkat nasional dan internasional.

HARIADI KARTODIHARDJO. Lahir di Jombang 24 April 1958. Doktor bidang Ekonomi Kelembagaan Kehutanan dari IPB Tahun 1998. Selain Dosen di Fakultas Kehutanan IPB, beliau juga menjadi Komite Materi Lembaga Ekolabeling Indonesia, Peneliti CIFOR, WRI, Anggota Tim

Reformasi Perum Perhutani, Sekretaris Tim Reformasi Kehutanan dan Perkebunan. Jabatan saat ini adalah Deputy Pengendalian Lingkungan, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup/Bapedal. Beliau aktif melakukan penelitian khususnya pada aspek kebijakan dan kelembagaan pengelolaan hutan serta pembicara berbagai seminar tingkat nasional dan internasional.

SOETRISNO T. SUDIRJO. Lahir di Solo 14 Februari 1937. Sarjana Teknik Kimia dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1962. Saat ini menjadi Ahli Peneliti Madya Bidang Teknologi Selulosa pada Balai Besar Teknologi Selulosa Bandung dan Teknologi Pengolahan Limbah Industri Pulp dan Kertas, banyak diterbitkan pada jurnal penelitian baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Jabatan yang pernah dijabat beliau pada Balai Besar Selulosa antara lain Kepala Unit Pulp (1973-1980), Kepala Balai Derivat Selulosa dan Polusi (1980-1985) dan Kepala Balai Besar Selulosa (1985-1996). Selain penelitian beliau juga aktif pada organisasi profesi Badan Kejuruan Kimia, Persatuan Insinyur Indonesia, dan Himpunan Polymer Indonesia.

RUDY C TARUMINGKENG. Lahir di Manado. Sarjana Kehutanan dari IPB, Master Forestry dari Duke University Durham North Caroline, USA; Doktor of Philosophy dari University of Wisconsin, Medisan, USA. Jakarta yang pernah dipercayakan kepada beliau antara lain, dekan Fakultas Kehutanan IPB, Rektor Uncen Jayapura, Rektor UKRIDA Jakarta, Anggota MPR-RI dan Delegasi RI pada Congress IUCN (Nature Conservation, Congres on Sustainable Development dan Intergovernmental Panel on Forest. Ratusan karya ilmiah beliau telah dipublikasikan.

OEMI HANI'IN SOESENSO. Lahir di di Sukakarta, 1 Januari 1931. Sarjana Kehutanan dari Universitas Gajah Mada (UGM) tahun 1961, Doktor bidang Pemuliaan Pohon Hutan dari UGM tahun 1988. Selain itu beliau pernah memperoleh kursus dibidang Silviculture and Forest Ecology di University of California tahun 1963, Silviculture di Minesota University tahun 1973. Selain sebagai Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM, beliau juga dipercayakan menjabat berbagai Ketua Tim (Pakar) dalam bidang pemuliaan tanaman hutan, reboisasi, perbenihan dll. Beliau juga menjadi pembicara pada berbagai seminar dalam dan luar negeri.

NYOMAN J. WISTARA. Lahir di Bali 31 Desember 1963. Sarjana Bidang Teknologi Produk Kehutanan diperoleh dari Institut Pertanian Bogor tahun 1984, Master bidang pulp dan kertas di Institut Pertanian Bogor tahun 1992 dan memperoleh gelar Doktor bidang teknologi pulp dan kertas di University of Wisconsin, Madison, USA. Selain sebagai staf pengajar pada Fakultas Kehutanan IPB, beliau juga aktif melakukan berbagai penelitian dan pembicara pada berbagai seminar. Sebagian hasil penelitian beliau telah dipublikasikan pada berbagai jurnal ilmiah nasional dan internasional.

MAKMUR DAMANIK. Lahir di Medan 21 Juli 1962. Sarjana S-1 dari Institut Pertanian Bogor, tahun 1987. Manager Penelitian dan Pengembangan Hutan PT Inti Indorayon Utama. Aktif mengikuti seminar bidang kehutanan di dalam dan luar negeri.